

INDUSTRI KEUANGAN BANK SYARIAH NASIONAL DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

DEDI ISKAMTO

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau
deditaba@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the position of the National Islamic banking in the ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community (AEC) which started in 2015 is a challenge for activists industry sharia economy. Industrial age who are not young, it should be ready to meet the sharia economic industry single market in Southeast Asia in 2015. Islamic banking, which proved resistant to crises, in particular in 1998, became the capital to face free competition in the region. ASEAN Economic Community (AEC) is a certainty that will be faced by the entire people of Indonesia and the need to anticipate that business people Indonesia not just be a spectator but also players who take advantage of the MEA. After going through a SWOT analysis of the current condition of Indonesia is in the Defensive Cells 4. Cell 4 is the most unfavorable situation. Companies facing major environmental threat, interim relatively weak position. This situation clearly requires strategies that fix involvement in product or market that can be studied.

Keyword: Islamic Banks, ASEAN, Indonesian Economy, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean yang semula direncanakan pada tahun 2020, telah dipercepat menjadi pada 31 Desember 2015. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini maka akan terjadi baik peluang maupun tantangan dalam perekonomian Indonesia. Peluang utama adalah dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), akan terjadi integrasi ekonomi. Masyarakat Asean memiliki tiga pilar kerjasama, yakni kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, kerjasama politik dan keamanan serta kerjasama sosial budaya. Ketiga pilar kerjasama ini harus berkaitan dan saling menunjang dalam mencapai stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.

Selama ini dimata investor global menatap pasar ASEAN, sekalipun memiliki populasi penduduk sekitar 530 juta jiwa dan sudah membentuk kawasan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area), namun pasarnya masih dinilai kurang atraktif, karena masih belum terintegrasi. Pasar ASEAN masih terfragmentasi dalam bentuk pasar dari 10 negara yang terkotak-kotak, dimana aliran barang, jasa dan modal belum dapat bergerak secara bebas. Maka, untuk membuat ASEAN lebih atraktif sehingga modal asing kembali mengalir dengan deras ke kawasan ASEAN, pasar ASEAN harus diintegrasikan dalam bentuk satu pasar tunggal (*single market*) yang sekaligus berperan sebagai basis dan jaringan produksi terpadu (*integrated production network*). Dimana aliran barang, jasa, modal

dan tenaga kerja mengalir dengan bebas dan lancar, tanpa mengenal batas-batas negara anggotanya. Pasar terintegrasi ini layak dikembangkan dalam suatu wujud Masyarakat Ekonomi Asean yang kompak dan terpadu.

Fokus dari Masyarakat Ekonomi Asean mencakup: penurunan hambatan tarif dan non tarif, penciptaan proses dan iklim bisnis yang kondusif dan bersahabat di kawasan Asia Tenggara, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, maksud dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean adalah :

- a. Menciptakan suatu kawasan Ekonomi Asia Tenggara yang stabil, makmur dan berdaya saing kuat.
- b. Memperlancar aliran barang dan jasa serta modal dan tenaga kerja agar dapat bergerak lebih bebas.
- c. Pengembangan kondisi ekonomi yang lebih berimbang di kawasan Asia Tenggara.
- d. Pengurangan kemiskinan dan perbedaan status sosial ekonomi di ini.
- e. Memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.
- f. Meningkatkan iklim investasi sehingga menjadi kondusif.
- g. Memperkuat perekonomian, dengan demikian akan membuat ASEAN lebih dipertimbangkan di dalam forum internasional dan menjadi kawasan yang disegani di dunia.

Berdasarkan penilaian Global Islamic Finance Report tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan potensi pengembangan industri keuangan

syariah setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, naik dua peringkat dari 2012. Di tingkat domestik, industri jasa keuangan syariah juga berkembang pesat dan secara perlahan mampu berperan serta dalam mendukung perekonomian nasional.

Saat ini di Indonesia telah memiliki industri keuangan syariah yang cukup lengkap. Mulai dari industri perbankan syariah, sampai dengan industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Selama dua dekade terakhir, tiga sektor jasa keuangan syariah tersebut telah menunjukkan perkembangan cukup pesat. Di level ASEAN, industri perbankan syariah Indonesia hanya kalah oleh Malaysia yang menduduki posisi kedua dunia.

Berdasarkan hasil laporan dari Islamic Financial Services Board 2013, dilihat dari rasio profitabilitasnya, industri perbankan syariah Indonesia lebih kompetitif jika dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu terlihat dari nilai *return on equity* dan *return on asset* perbankan syariah Indonesia yang mengalahkan Malaysia. Sementara dilihat dari besaran *market share* perbankan syariah di level ASEAN, GIFR menempatkan Indonesia (5%) pada peringkat kedua setelah Malaysia (18%). Modal itu cukup membuat lebih optimis menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Asia Tenggara, ada beberapa negara yang menjadi pemain besar di industri keuangan syariah terutama perbankan syariah yakni Indonesia dan Malaysia. Malaysia lebih dahulu mendirikan bank syariah, mulai tahun 1983 dan secara pangsa pasar lebih besar, dengan target 25% pada tahun 2014 (*The Star*).

Di Indonesia bank syariah baru didirikan bank syariah pada 1992, yaitu Bank Muamalat. Namun sekarang sudah terdapat 11 bank syariah yang beroperasi secara penuh dan 25 unit usaha syariah di Indonesia. Di Malaysia sendiri sudah terdapat 16 bank syariah yang beroperasi secara penuh (11 *subsidiary*) dan 10 *Islamic window bank*. Di Brunei ada 2 bank yang berdiri pada tahun 1991 dan 2005 yang merupakan hasil merger. Di negara Singapura baru 1 yang beroperasi penuh yang berdiri pada 2007. Di Thailand juga ada 1, yang berdiri 2002. Secara waktu dan sistem, percepatan bank di Indonesia lebih baik dan mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bidang merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dimana perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Untuk memudahkan di dalam melihat bentuk sistem ekonomi Islam, maka inti pertanyaan terhadap barang dan jasa sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia tersebut dapat disederhanakan dengan tiga komponen, yaitu (1) Konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), (2) Konsep pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fil milkiyah*) dan (3) Konsep distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (*riba*), *riba* merupakan pemerasan kepada orang yang

sesak hidupnya (terdesak oleh kebutuhan). Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung *riba*. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Yaitu komponennya adalah hukum dan sumber komponennya adalah berasal dari Islam. Dengan demikian sistem ekonomi Islam dapat diambil suatu pengertian sebagai hukum syariah yang berkaitan dengan pengaturan urusan harta.

Ekonomi Islam menurut Kursyid Ahmad dalam Mustafa Edwin Nasution (2006,17) “ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam”. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam” Muhammad Abdul Manan (1997, 19). Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah” (P3EI, 2008:19).

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme,

sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaiapun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Menurut Metwally dalam Zainal Arifin (2002), prinsip dasar ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui didalam batas tertentu yang berhubungan dengan

kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.

3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki kepada makhluk yang diciptakan-Nya.
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuknya, karena secara tegas telah tercantum dalam Alquran.

Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula di dalam hal ekonomi, tujuannya adalah untuk membantu manusia mencapai ketenangan

di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu :

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi lima jaminan dasar yaitu:
 - a. Kamaslahatan keyakinan agama (al din).
 - b. Kamaslahatan jiwa (al nafs).
 - c. Kamaslahatan akal (al aql).
 - d. Kamaslahatan keluarga dan keturunan (al nasl).
 - e. Kamaslahatan harta benda (al mal).

Kontrol Sistem Ekonomi Islam

Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah:

1. Kekuasaan *Al-Hisbah*

Hakim hisbah melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan, takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum serta monitor sebagai pelanggaran lainnya.

2. Kekuasaan Peradilan

Peradilan akan menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan finansial

dan ekonomi, yang muncul dalam muamalah keseharian masyarakat.

3. Berbagai Biro

Berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di baitul mal yang berkaitan dengan harta zakat, harta Negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. Biro tersebut menangani kontrol atau pengawasan terhadap pemungutan dan pembelanjaan agar setiap aliran harta terjadi pada tempatnya secara benar.

4. Kekuasaan Mazhalim

Mazhalim menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan melawan penguasa jika mereka melakukan kezhaliman terhadap rakyat dalam segala kebijakan di segala bidang, termasuk kebijakan finansial dan ekonomi.

Tulisan ini akan membahas bagaimana Masyarakat Ekonomi Asean dapat mempengaruhi pasar Ekonomi Syariah Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat mengambil manfaat terhadap pasar ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur kepustakaan dan teknologi multimedia. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik kajian studi pustaka dan informasi teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisa strategis dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan membandingkan *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) dan melakukan kajian

terhadap *Opportunitiy* (kesempatan) dan *Treath* (ancaman). SWOT adalah singkatan dari *Strengths* dan *Weaknesses* serta *Opportunities* dan *Threats*. Analisis SWOT diperkenalkan oleh Albert Humphrey, yaitu pemimpin proyek riset pada Stanford University pada tahun 1960-an dan 1970-an ketika menggunakan data perusahaan-perusahaan dari Fortune.

SWOT is an acronym for the internal strengths and weaknesses of a business and enviromental opportunities and threats facing that business (John A. P and Richard Braden Robinson, 1988:292). SWOT is an acronym for a company's Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (Arthur A. Thompson, J. R. and A. J. Strickland III, 1993:87).

Analisis SWOT adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan kecocokan yang paling baik. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman, Pearce dan Robinson (1997, 235). Menurut Rangkuti (2000,18) "Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*)".

SWOT analysis is a systematic identification of these faktors and the strategy that reflects the best match between them. It is based on the logic that an effective strategy maximizes a business's Strengths and Opportunities but at the same time minimizes its Weaknesses and Threats (John A. P & Richard Braden Robinson, 1988). SWOT analysis is the

identification of a firm's Strengths and Weaknesses and its enviromental Threats and Opportunities. Michael A. Hitt et al., 2007). SWOT analysis is the comparison of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treaths is normally referred (Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, 2012).

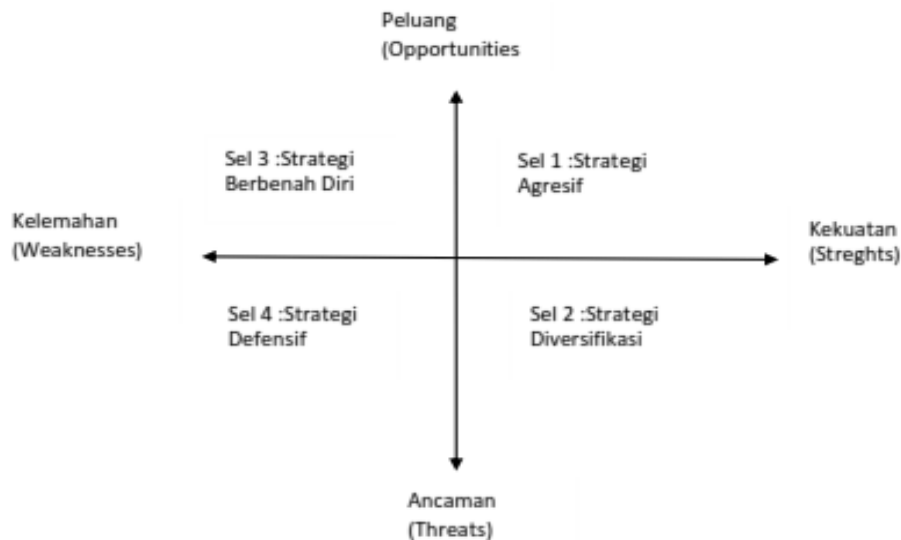
Menurut Kurtz (2008,45), analisis SWOT adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari *external*. Menurut Pearce dan Robinson (1997,134), analisis SWOT perlu dilakukan karena analisa SWOT untuk mencocokkan "fit" antara sumber daya internal dan situasi eksternal perusahaan. Pencocokkan yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan dan meminimumkan kelemahan dan ancamannya. Dimana asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang kuat untuk strategi yang sukses.

Menurut Duncan (2007,142), menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan hal penting dalam proses perencanaan strategi. Faktor-faktor lingkungan internal di dalam perusahaan biasanya dapat digolongkan sebagai *Strength* (S) atau *Weakness* (W), dan lingkungan eksternal perusahaan diklasifikasikan sebagai *Opportunities* (O) atau *Threat* (T). Analisis lingkungan pada strategi ini disebut dengan analisis SWOT.

Menurut Thompson (2008,97), analisa SWOT adalah simpel tetapi merupakan alat bantu yang sangat kuat untuk memperbesar kapabilitas serta mengetahui ketidak efisienan sumber daya perusahaan, kesempatan dari

pasar dan ancaman eksternal untuk masa depan agar lebih baik lagi. Menurut Fred David (1996,134), analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik

dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Cara pemanfaatan analisis SWOT untuk membantu analisis strategi di ilustrasikan dalam diagram dibawah ini.



Sumber : Pearce & Robinson, 1997

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

Peluang dan ancaman secara sistematis dibandingkan dengan kekuatan dan kelemahan intern dengan ancaman yang terstruktur. Sasarannya adalah mengidentifikasi satu dari empat pola yang mencocokkan situasi intern dan ekstern. Pola ini digambarkan oleh empat sel dalam gambar.

Sel 1 adalah situasi yang paling disukai, organisasi menghadapi beberapa peluang dan dengan banyak kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Situasi ini menyarankan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan (*Growth oriented strategy*) untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini.

Sel 2 organisasi dengan kekuatan-kekuatan tertentu menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, strategi akan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang jangka panjang.

Sel 3 menghadapi peluang pasar yang impresif tetapi dikendali oleh kelemahan-kelemahan intern. Fokus strategi bagi strategi organisasi seperti ini adalah meniadakan kelemahan intern agar dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang pasar.

Sel 4 merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi ancaman lingkungan yang besar, sementara posisinya relatif lemah.

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Eksternal	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Peluang (O)	Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan	
Ancaman (T)		
	Mengerahkan kekuatan Kekuatan/Ancaman	Mengendalikan ancaman Kelemahan/Ancaman

Gambar 2. Intisari Pemetaan Matrix SWOT

PEMBAHASAN

Masyarakat Ekonomi Asean yang dimulai tahun 2015 menjadi tantangan tersendiri bagi pegiat industri ekonomi syariah. Dengan usia yang bisa dianggap tidak lagi muda, sudah seharusnya industri ekonomi syariah siap menyongsong pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada 2015. Perbankan syariah yang terbukti tahan terhadap terpaan krisis, khususnya pada 1998, menjadi modal menghadapi persaingan bebas di kawasan regional. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) harus dilihat sebagai peluang sehingga mereka yang terlibat aktif dalam perbankan dan jasa keuangan syariah semakin terpacu meningkatkan kualitas.

Syarat untuk memenangkan persaingan ini dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara lain. Pemerintah sudah tentu harus berpihak pada warga negaranya. Upaya meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan merupakan keharusan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 harus dihadapi dengan

melakukan berbagai aksi nyata. Salah satunya, meningkatkan peranan pemerintah di sektor industri keuangan syariah.

Kita tahu selama ini di Indonesia pasar keuangan syariah lebih banyak digerakkan oleh pasar. Regulasi yang tidak berpihak pada sektor keuangan syariah ini mengakibatkan industri perbankan syariah kita masih kalah jika dibandingkan Malaysia. Kondisi ini bisa dilihat dari data dari Respective Bank's Financial Reports pada periode 31 Desember 2012. Aset lima bank syariah besar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia kalah jauh dari perbankan Malaysia. Jika aset BSM 5,1 miliar dolar AS, maka itu kalah jauh dengan Maybank Islamic yang memiliki aset 29,9 miliar dolar AS. Aset BSM bahkan masih kalah jika dibandingkan RHB Islamic yang asetnya 8,4 miliar dolar, padahal bank ini menduduki posisi kelima, sementara Bank Syariah Mandiri posisi pertama di Indonesia. Namun, setelah itu, harus ada langkah konkret lain yang bisa dilakukan

kepala negara untuk meningkatkan industri keuangan syariah. Jika mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mempromosikan ekonomi syariah melalui Gerakan Ekonomi Syariah 17 November 2013, Joko Widodo harus melanjutkan estafet gerakan ini dengan melakukan yang lebih baik dan gencar. Susilo Bambang Yudoyono bahkan menjadikan ekonomi syariah sebagai gerakan nasional. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba mengingat dalam kurun lima tahun (2008-2012), aset perbankan syariah meningkat 40%. Jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang meningkat 16,6%, perbankan syariah jauh lebih unggul (Alwyni, 2013).

Keunggulan dari industri keuangan syariah ini sebenarnya tidak hanya perbankan. Berdasarkan data yang dirilis Global Islamic Finance Reports (GIFR) 2011, terjadi peningkatan persentase di beberapa sektor keuangan syariah Indonesia. Di antaranya adalah aset perbankan Islam, Sumber Daya Manusia perbankan Islam, Sukuk Negara, *corporate* sukuk, Islamic Mutual Funds, dan asuransi syariah. GIFR mencatat Indonesia menduduki posisi keempat dalam percepatan pertumbuhan keuangan syariah global. Indonesia berada di bawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi.

Dengan pertumbuhan di atas, maka akan membutuhkan setidaknya 20 ribu profesional di industri ekonomi syariah. Jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015, dengan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia yang demikian besar, masuknya tenaga kerja asing bukan lagi sesuatu yang bisa ditahan. Persoalan ketenagakerjaan ini menjadi isu utama di berbagai media massa

jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Secara regulasi, pengaturannya tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003.

Persoalan Sumber Daya Manusia tentu berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan. Jika mengacu pada undang-undang di atas, tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Terkait hal ini, tentunya tidak melulu menjadi persoalan pemerintah. Para pelaku bisnis keuangan syariah pun bisa ikut ambil bagian, seperti perlindungan tenaga kerja, peningkatan hubungan industrial hingga kesejahteraan.

Kita masih berharap ada langkah konkret dan keberpihakan dari Pemerintah jelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, khususnya di sektor industri keuangan syariah. Konsekuensi dari pencaanangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini adalah persaingan yang mendunia. Hanya dengan menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbaik, Indonesia akan mampu melewati berbagai tantangan yang akan dihadapi tahun depan. Sudah tentu, itu semua tidak akan terwujud tanpa campur tangan pemerintah.

Belakangan ini tanggapan positif masyarakat terhadap syariah kian menguat dan akan meningkatkan *market share* perbankan syariah. Indonesia pun sudah mempunyai lembaga resmi, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dapat membuat serta merekonsiliasi standar keuangan syariah sesuai dengan dasar-dasar yang kuat.

Keunggulan dari industri keuangan syariah ini sebenarnya tidak hanya pada industri

perbankan. Berdasarkan data yang dirilis Global Islamic Finance Reports 2011, terjadi peningkatan persentase di beberapa sektor keuangan syariah Indonesia, di antaranya aset perbankan Islam, Sumber Daya Manusia perbankan Islam, sukuk negara, *corporate sukuk*, *Islamic mutual funds*, dan asuransi syariah. Tercatat Indonesia menduduki posisi keempat didalam percepatan pertumbuhan keuangan syariah global. Indonesia berada di bawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Oleh sebab itu, industri perbankan syariah dan ekonomi syariah perlu dikembangkan oleh negara ini dalam rangka berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu membukukan aset sekitar USD 5,5 miliar, sehingga belum ada yang masuk ke dalam jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di dunia. Sementara itu, tiga bank syariah Malaysia mampu masuk dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah dengan bank syariah Malaysia yang akan menjadi kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi.

Analisis SWOT

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan internal *Strength* (S) dan *Weakness* (W), serta lingkungan eksternal *Opportunities* (O) dan *Threat* (T).

Kekuatan (*Strength*)

1. Memiliki Banyak Sumber daya Insani yang Terdidik.

Dengan keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia, mulai terjadi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia itu dapat terlihat mulai meningkatnya angka penduduk yang menikmati pendidikan tinggi. Saat ini hampir disemua kabupaten telah berdiri perguruan tinggi. Tentunya hal ini merupakan sebuah kekuatan bagi Indonesia dalam menyongsong pasar bebas ASEAN. Walaupun diakui bahwa dari segi kualitas sumber daya kita masih dibawah rata-rata negara ASEAN.

2. Pembangunan Ekonomi yang Membaik. Selama periode 1999-2009 pertumbuhan ekspor produk industri mencapai 17,7% per tahun dan pertambangan 72,3% per tahun. Selain itu angka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus membaik berkisar antara 6%-7% pertahun. Pertumbuhan ini bahkan tetap bertahan pada saat krisis ekonomi dunia terjadi di tahun 2008. Pertumbuhan yang cenderung stabil ini telah menjadikan Indonesia salah satu tujuan investor internasional.
3. Makin Bervariasinya Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Saat ini Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia makin pesat hampir semua sektor Ekonomi saat ini dimasuki oleh Sistem Ekonomi Islam ini, Mulai dari Perbankan, Asuransi, *Finance*, Koperasi, Perhotelan dan Pariwisata, dan lain-lain. Tentunya

ini menjadi kekuatan bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Industri perbankan syariah Indonesia, belum memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. BOPO (biaya operasional berbanding pendapatan operasional) perbankan syariah Indonesia masih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. BOPO bank di Indonesia sampai 75%, sementara bank di negara lain 60%.
2. Belum ada bank Syariah yang masuk persyaratan sebagai ASEAN *qualified bank*. Padahal, jika bank masuk dalam kategori ini dan berencana ekspansi ke negara-negara lain di Asia Tenggara, maka bank akan memperoleh perlakuan yang sama dengan bank domestik di negara tersebut. Persyaratan untuk masuk sebagai ASEAN *qualified bank* diantaranya adalah memiliki regulasi yang memenuhi prinsip kehati-hatian, memenuhi aturan Basel III, bank dimiliki oleh warga negara di Asia Tenggara, dan punya tingkat kesehatan yang baik dengan peringkat I atau II.
3. Masih rendahnya angka penetrasi internet. Saat ini pergerakan bank sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi khususnya Internet. Semakin tinggi intensitas penggunaan internet dapat meningkatkan kuantitas transaksi dan pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan bank.
4. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai.

Walaupun Indonesia memiliki jumlah sumber daya yang besar tetapi karena kualitas pendidikan di Indonesia masih lemah, khususnya pada penguasaan bahasa Inggris, informasi teknologi dan kemampuan pemahaman agama, menjadikan kualitas SDM Indonesia masih dibawah rata-rata kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. Variasi produk yang masih terbatas. Jika dibandingkan dengan bank syariah di negara ASEAN lainnya produk perbankan syariah Indonesia masih sangat terbatas.
6. Kurangnya dukungan pemerintah. Walaupun saat ini menteri keuangan adalah orang yang akif dalam bidang ekonomi syariah tetapi secara umum dukungan terhadap ekonomi syariah masih sangat kurang jika dibandingkan pemerintah negara lain seperti Malaysia dan Brunei.
7. Permodalan Industri jasa keuangan syariah yang masih kecil. Memiliki keterbatasan untuk meningkatkan daya saing dalam bentuk investasi pada teknologi dan Sumber Daya Manusia terbaik.

Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan internal. Kecenderungan-kecenderungan adalah salah satu sumber peluang. Dengan bergabung ekonomi Indonesia kedalam *ASEAN Community Economic*.

1. Memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Dengan masuknya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi Asean maka peluang mendapatkan

pasar yang luas dan lebih berkualitas terbuka luas.

2. Lebih mudah memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Saat ini persoalan utama Sumber Daya Manusia Indonesia adalah lemahnya kualitas sehingga menghambat perkembangannya.

Ancaman (*Threats*)

Adapun yang akan dihadapi Indonesia khususnya daerah dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Serbuan produk asing sektor keuangan syariah yang lebih dipercaya baik secara kualitas maupun secara proses syariah.

Dapat mengakibatkan kekalahan telak perbankan Syariah Indonesia. Apalagi di Indonesia masih ada budaya lebih bangga memakai produk asing daripada buatan dalam negeri.

2. Apabila sektor-sektor keuangan syariah dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari luar.

Dikhawatirkan industri ini akan mengalami penurunan *market share* atau bahkan sampai gulung tikar dan bisa menyebabkan terjadinya pengangguran.

3. Tenaga Kerja asing yang lebih profesional, terlatih, dan lebih menguasai teknologi Informasi dan bahasa Inggris.

Dapat menyebabkan tenaga lulusan fakultas Ekonomi Syariah Indonesia menjadi tertinggal.

4. Lebih beragamnya pilihan produk keuangan syariah asing.

Dapat memikat nasabah Indonesia untuk berpindah menyukai perbankan asing daripada Indonesia.

Strategi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean adalah sebuah kepastian yang akan dihadapi seluruh masyarakat Indonesia dan perlu dilakukan antisipasi agar masyarakat Indonesia di seluruh daerah tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pemain yang mengambil keuntungan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Setelah melalui analisa SWOT maka kondisi Indonesia saat ini berada di Sel 4. Sehingga strategi yang digunakan adalah strategi Sel 4, Defensif. Dimana sel 4 merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi ancaman lingkungan yang besar, sementara posisinya relatif lemah. Situasi ini jelas menuntut strategi yang membenahi keterlibatan dalam produk atau pasar yang ditelaah (Pearce & Robinson, 1997:232).

Strategi Sel 4, Defensif

Dengan analisa SWOT diatas maka posisi strategi yang harus dijalankan oleh sektor perbankan syariah di Indonesia adalah langkah Sel 4. Ditengah ancaman yang semakin besar sedangkan keadaan industri dalam posisi yang lemah. Adapun langkah yang harus dilaksanakan diantaranya adalah memperkuat secara internal dengan:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Selama ini terkadang sumber daya pada sektor perbankan syariah adalah sumber

daya yang kurang kompeten dan merupakan buangan dari sektor perbankan konvensional. Sudah saatnya perbankan syariah merekrut atau mendidik SDM menjadi Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional.

2. Perbankan Syariah ASEAN begitu maju dengan inovasi produk dan layanan perbankan yang kompetitif serta berbasis atas kebutuhan masyarakat.

Mau tidak mau pihak perbankan nasional juga harus aktif dan kreatif mengikuti hal tersebut.

3. Walaupun pangsa pasar bank syariah di Indonesia besar tetapi *market share* perbankan syariah masih kecil.

Hal ini menjadi tantangan agar pihak perbankan syariah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan *market share*.

4. Pemerintah sebagai legislator harus mampu memberikan kerangka hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penyelesaian masalah keuangan syariah secara komprehensif.

5. Adanya kodifikasi produk dan standar regulasi secara nasional dan global sebagai jembatan dalam perbedaan terhadap fiqh muamalah, dan diperlukannya nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah.

KESIMPULAN

Masyarakat Ekonomi Asean adalah sebuah hal yang pasti akan dihadapi seluruh sektor Ekonomi Indonesia tanpa persiapan dan strategi untukantisipasi maka masyarakat

ekonomi Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam bukan pelaku aktif. Walaupun perbankan syariah Indonesia terbukti mampu melewati masa-masa krisis ekonomi mulai tahun 1998, 2008 hingga 2012 tetapi secara umum ada kecenderungan kemampuan modal bank syariah semakin menurun. Jika tidak mendapat penanganan secara serius oleh pemerintah maka sektor perbankan syariah akan berjalan terseok-seok dan kalah bersaing dengan bank sejenis dari negara jiran.

Total aset bank dari Indonesia lebih kecil dibanding bank dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Hanya lima bank asal Indonesia yang masuk dalam Top 500 Banks. Secara garis besar Indonesia di kancah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak kompetitif dilihat dari sisi modal, kapitalisasi pasar dan aset dengan sumber dana yang terbatas dan rendahnya akses keuangan. Untuk itu ini menjadi pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun pelaku industri perbankan syariah untuk memajukan sektor ini agar tidak ketinggalan ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah terlaksana. Selain itu Pemerintah sebagai regulator harus terus mendorong perbankan untuk menambah modal atau melakukan perbaikan efisiensi beban operasional agar mempersiapkan diri untuk menghadapi 2020 dengan menambah modal dan memperbaiki infrastruktur. Berada dalam strategi sel 4 memang berat tetapi bukan mustahil untuk mampu bersaing dan bangkit menjadi pemenang. Sudah banyak perusahaan yang membuktikan bahwa berada di strategi sel 4 bukan akhir segalanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur A. Thompson, Jr. and A. J. Strickland III. *Cases in Strategic Management*. 4th ed. New York: Richard D. Irwin, inc, 1992.
- Arthur A. Thompson, Jr. and A. J. Strickland III. *Strategic Management: Concept and Cases*. 7th ed. New York: Richard D. Irwin, inc, 1993.
- Arthur, Muhammad. *Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=4437>, 27 Maret 2012.
- Bank Indonesia. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Ascarya, 2006.
- Fred, R. David. *Strategic Management*. Ed 6. Francis Marian University: Prentice Hall International, Inc., 1996.
- Gregory, G. Dess, G. T. Lumpkin, and Marilyn L. Taylor. *Strategic Management*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2005.
- Hadad, Muliaman D. *Industri Keuangan Syariah Menghadapi MEA*. Kompasiana.com, 2014.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Jati, Wasisto Raharjo. Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9 (4), 2012.
- Karim, Abdul Gaffar. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kevin, P. Kearns. From Comparative Advantage to Damage Control: Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis. *Nonprofit Management and Leadership*. 3 (1). New York: Henry Holt University, 1992.
- Kurtz, D. L. *Principle of Contemporary Marketing*. Stamford: South-Western Educational Publishing, 2008.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti PrimaYas, 1997.
- Mudrajad, Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Noor, Isran. *Politik Otonomi Daerah untuk Penguatan NKRI*. Ebook. 2013.
- Nordholt, Henk Schulte. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pearce, Jhon A dan Richard B. Robinson, Jr. *Manajemen Strategic, formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Binurupa Aksara, 1997.

- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis-Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. 2006.
- Robert W. Bradford, Peter Duncan, & Brian Tarcy. *Simplified Strategic Planning: A Nonsense Guide for Busy People Who Want Result Fast*. New York: McGraw Hill, 2007.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syamsuddin, Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI, 2005.
- Thompson. *Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage*. 17th ed. New York: McGraw-Hill International Edition, 2008.

